

PENGARUH KONTESTASI POLITIK DESA TERHADAP KONFLIK AHMADIYAH DI GEGERUNG-LOMBOK BARAT

THE EFFECT OF VILLAGE POLITICAL CONTESTATION ON THE AHMADIYAH CONFLICT IN GEGERUNG-WEST LOMBOK

Mohamad Baihaqi

Mahasiswa Magister Studi Agama dan Resolusi Konflik
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
mohamadbaihaqi91@gmail.com

Artikel diterima 25 April, diseleksi 8 Mei, dan disetujui 22 Oktober 2020

Abstract

Attacks against the Ahmadiyah Congregation in Gegerung-Lombok occurred several times in 2005-2006, then continued in 2010. The contestation for the election of the Village Head of Gegerung coincided with the conflict and violence against the Ahmadiyah Community. It was later discovered that the religious leaders in the village were affiliated with one of the candidate village head contestants and were actively involved in the campaign. This study used a qualitative method with data digging techniques carried out through observations and interviews which were carried out in conflict locations and places of refuge in the Ahmadiyah congregation. Meanwhile, interviews were conducted with a number of parties, namely the relevant village head, the Ahmadiyah community, representatives of the NTB government, and the people of Gegerung. The analysis was carried out through data reduction and selecting data relevant to the object of research. The results of this study indicate that the conflict and violence against the Ahmadiyah Jama'at is not only caused by differences in beliefs, the existence of a "deviant" fatwa from the MUI and discriminatory regulations from the West Lombok Regent. Behind the complexity of religious issues, there are other triggers, namely contestation of village head elections and the involvement of political actors in the mass mobilization process. Village Politics, which are in the lowest unit of the bureaucratic system, can actually have an impact on the community and village elites who have financial capital more freely to dominate public discourse. The conflict and violence against

Abstrak

Penyerangan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung-Lombok terjadi beberapa kali pada tahun 2005-2006, kemudian berlanjut pada 2010. Kontestasi pemilihan Kepala Desa Gegerung bertepatan dengan konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Belakangan diketahui bahwa tokoh agama di desa tersebut berafiliasi dengan salah satu kontestan calon kepala desa dan terlibat aktif dalam kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penggalian data dilakukan lewat observasi dan wawancara yang dilaksanakan di lokasi konflik dan tempat pengungsian Jemaat Ahmadiyah. Sementara itu, wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak, yaitu kepala desa terkait, Jemaat Ahmadiyah, perwakilan pemerintah NTB, dan masyarakat Gegerung. Analisis dilakukan melalui reduksi data dan menyeleksi data yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah tidak hanya disebabkan oleh faktor perbedaan keyakinan, adanya fatwa "sesat" dari MUI maupun peraturan diskriminatif Bupati Lombok Barat. Di balik kompleksitas persoalan keagamaan, terdapat pemicu lain yakni kontestasi pemilihan kepala desa dan keterlibatan para aktor politik dalam proses mobilisasi massa. Politik desa yang berada dalam unit terbawah sistem birokrasi malah dampaknya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan para elit-elit desa yang memiliki modal finansial lebih leluasa mendominasi wacana publik. Konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Desa Gegerung justru dipicu

Ahmadiyah in Gegerung Village were actually triggered by the intervention of village politicians and religious leaders who made differences in religious understanding as a political commodity.

Keywords: *Ahmadiyah, Village Politics, Conflict-Violence*

PENDAHULUAN

Ahmadiyah bukanlah gerakan keagamaan baru di Indonesia. Bahkan sejak 1918, kabar mengenai Ahmadiyah sudah terdengar, sebelum akhirnya diperkenalkan secara langsung pada 1920. Terdapat dua kelompok penganut Ahmadiyah, yakni Ahmadiyah Qadian yang mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi. Mereka memusatkan gerakannya di Parung, Bogor. Aliran Ahmadiyah yang lain di Indonesia adalah Lahore yang berpusat di Yogyakarta. Aliran Lahore menganggap Mirza Ghulam Ahmad seorang pembaharu Islam (Iskandar, 2002).

Pada tahun 1953, Ahmadiyah di Indonesia mulai mendapat legalitas badan hukum, sedangkan pada 2003, Ahmadiyah mendapat izin sebagai organisasi kemasyarakatan melalui surat Direktorat Hubungan Kelembagaan Politik No. 75//D.I./VI/2003 (Iskandar, 2002). Namun, izin sebagai organisasi kemasyarakatan itu tidak mengurangi tindakan kaum Muslim lain untuk memusuhi Ahmadiyah. Apalagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa "sesat" untuk aliran Ahmadiyah Qadian yang berkembang di Indonesia sejak tahun 1980. Fatwa tersebut dipertegas dengan surat edaran Departemen Agama, tahun 1984 yang melarang ajaran Ahmadiyah (Lay, 2009). Secara umum, di Indonesia, konflik-konflik Ahmadiyah merebak dan peristiwa-peristiwa tersebut kerap kali diabaikan. Alat negara acapkali tak hadir dalam menjamin kebebasan beragama

oleh adanya campur tangan politisi desa dan tokoh agama yang menjadikan perbedaan pemahaman keagamaan sebagai komoditas politik.

Kata Kunci: Ahmadiyah, Politik Desa, Konflik-Kekerasan

ketika kelompok mayoritas melakukan kekerasan terhadap minoritas. Kepolisian tak sepenuhnya mampu mengamankan kekerasan di pelbagai tempat.

Sedangkan di Lombok, jemaat Ahmadiyah diperkirakan masuk sejak 1957 dibawa oleh Jafar Ahmad setelah belajar di Surabaya (Nurhikmah, 2013). Perjalanan Ahmadiyah sebagai gerakan keagamaan mengalami dinamika pada setiap zamannya. Perdebatan dan dialog mengenai gerakan ini sejak prakemerdekaan sudah berlangsung. Meski belakangan, perdebatan dan dialog semacam itu nyaris ditutup, hanya konflik dan kekerasan yang terus mengemuka. Respons aktor pemegang otoritas agama seragam: Ahmadiyah masuk dalam kategori "sesat". Salah satunya, Wakil MUI Lombok Barat yang menilai bahwa masyarakat di Lombok, khususnya warga Desa Gegerung sudah lama menolak keberadaan Jemaat Ahmadiyah. Apalagi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat telah menyatakan ajaran Ahmadiyah sebagai terlarang dalam SK Bupati. Instruksi pelarangan tersebut diterbitkan setelah pemerintah berkoordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama Lombok Barat

Di Lombok sendiri kekerasan terhadap Ahmadiyah merebak di seluruh kabupaten, kecuali di Kota Mataram. Setelah mengalami kekerasan berturut-turut, Jemaat Ahmadiyah meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke Desa Gegerung. Namun konflik dan kekerasan pun terjadi di Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok

Barat. Hingga saat ini puluhan warga Ahmadiyah terpaksa mengungsi di asrama Transito Kota Mataram setelah mengalami pengusiran dari rumahnya di Desa Sambi Elen, Kabupaten Lombok Utara dan Desa Pancor, Kabupaten Lombok Timur. Sebelum kemudian diusir dari dusun Ketapang, Desa Geherung, Lombok Barat.

Asrama tempat Jemaat Ahmadiyah ditampung terletak di kelurahan Majeluk, kota Mataram. Mereka hidup berdesak-desakkan dalam sebuah bangunan sempit bekas kantor transmigrasi. Namun setelah 15 tahun mereka tinggal, secara bertahap beberapa warga Ahmadiyah berhasil menyewa dan membeli rumah di sekitar kota Mataram. Penghuni di asrama Transito juga menurun. Awalnya dihuni oleh 62 Kepala Keluarga (KK) dan kini mereka tinggal bersama 33 KK. Ketika pertama kali diungsikan, warga Ahmadiyah merasa kesulitan memertahankan hidupnya. Akhirnya beberapa warga menjual beberapa sisa aset tanah di Lombok Timur. Hasil penjualan lahan tersebut, dibagikan secara merata kepada seluruh warga yang tinggal di asrama Transito. Akan tetapi hasil penjualan tanah hanya bertahan beberapa bulan (Wawancara dengan Ahmad Saleh, 14 Maret 2020).

Dari kompleksitas persoalan di atas menyebabkan sejumlah akademisi, NGO, dan lembaga-lembaga sosial tingkat lokal maupun nasional turut melakukan advokasi, kajian, dan penelitian. Penelitian-penelitian sebelumnya tentang kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah berupaya melihat pola dan pemicu konflik dari pelbagai perspektif. Tidak sedikit peneliti dari dalam dan luar negeri yang menghubungkan antara konflik dan kebijakan negara. Salah satunya lewat fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional VI, tahun 2005, dengan SK nomor 11/MUNAS/ MUI/15/2015 menetapkan dan menegaskan hasil MUNAS 1980 bahwa

aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat dan menyesatkan serta orang Islam yang mengikutinya adalah murtad. Belakangan muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung nomor 3, tahun 2008, terkait peringatan pemerintah terhadap Jemaat Ahmadiyah.

Penelitian ini antara lain menggunakan acuan dari peneliti sebelumnya seperti Abdul Jamil Wahab dan Fakhruddin, "*Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur*", (*Jurnal Harmoni* vol. 17, Nomor 2, hlm. 457). Abdul Gaffar, "*Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB*", (*Jurnal Sosiologi Islam*, vol. 3, Nomor 2, Oktober 2013). Nurhikmah, "*Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan JAI di Lombok*", (Yogyakarta: Tesis Universitas Sanata Dharma, 2013). M Amin, Tutu Chusniyah, Aji Bagus Priyambodo "*Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jemaat Ahmadiyah dan Jamaah NW Pancor Lombok Timur*", (Makalah Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenius Indonesia, 2018). Ayub Mursalin, Bakhtiar Hasan, "*Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011*", (*Jurnal Kontekstualita*, Vol. 26, No.1, 2011).

Penelitian-penelitian tersebut menjelaskan relasi Jemaat Ahmadiyah dengan warga setempat, pemerintah daerah, dan kebijakan negara di level makro. Namun luput menengok dan menelaah bagaimana mekanisme birokrasi di tingkat terkecil di desa sampai di dusun bekerja. Sementara itu, dalam tulisan ini akan diamati lebih jauh apakah terdapat hubungan antara situasi politik Desa Geherung

dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah? Apakah hubungan tersebut memiliki korelasi dengan konflik dan kekerasan? Mengingat konflik dan kekerasan terjadi berturut-turut dan menyebabkan jemaat Ahmadiyah mengalami luka-luka dan kerugian materil lainnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang disajikan secara analisis-deskriptif. Penggalan data dilakukan lewat observasi dan wawancara dengan pelbagai aktor politik desa, perwakilan pemerintah, dan warga di Desa Gegerung dan Jemaat Ahmadiyah sendiri. Penggalan data dari pelbagai sumber dilakukan semenjak tahun 2018-2020 yang dilaksanakan di asrama Transito, Majeluk, Mataram dan di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Sementara itu acuan pustaka yang digunakan berasal dari sejumlah hasil penelitian sebelumnya baik dari buku maupun artikel di jurnal. Data diperoleh dengan melakukan observasi dan wawancara. Observasi dilakukan di lokasi konflik sementara itu wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan data yang masuk dan dirasa perlu digali kembali lalu kemudian dikonfirmasi kepada pihak terkait. Informan dalam penelitian ini yakni; Jemaat Ahmadiyah, Kepala Desa Gegerung periode 2001-2006, Kepala Desa Gegerung periode 2006-2011, warga Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Lombok Barat, dan perwakilan pemerintah dari Kesbangpoldagri NTB. Data dari sejumlah dokumen dan informan kemudian dikumpulkan.

Proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan variabel penelitian dan menangguk data yang tidak relevan. Selanjutnya data yang telah direduksi

itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian yaitu proses dan kronologi peristiwa, aktor yang terlibat, penyebab terjadinya peristiwa, pemahaman stakeholder terhadap Ahmadiyah dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam proses resolusi konflik. Proses selanjutnya adalah menyusun dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis

INSTRUMENTALISASI KONFLIK: BINGKAI TEORI

Dalam sosiologi, konflik adalah proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memerhatikan norma dan nilai yang berlaku. Konflik sebagai dua atau lebih reaksi yang bertentangan terhadap suatu peristiwa atau perbedaan antara dua individu, adanya saling permusuhan antara kelompok, atau adanya suatu masalah yang harus diselesaikan (Bakhtiar Hasan, Ayub Mursalin, 2011). Dalam tulisan ini konflik diposisikan sebagai kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membawa kepada ketidakharmonisan terhadap individu ataupun kelompok. Karena konflik merupakan fenomena sosiologis, konflik dapat dibedakan dari sudut pandang yang terlibat konflik.

Dalam hal ini, konflik antara warga Ahmadiyah dan masyarakat Desa Gegerung, Lombok Barat di permukaan tampak dipicu oleh hal-hal yang bersifat simplistis seperti sentimen dan kecurigaan warga Gegerung. Namun tanpa diperkuat oleh faktor-faktor sosial-politik yang melibatkan pimpinan formal dan non-formal, gerakan massa tidak akan bergerak secara terstruktur dan massif. Dalam konteks saat ini, ajaran agama sering diklaim sebagai penyebab timbulnya konflik dan kekerasan. Hal tersebut disebabkan beberapa

indikator atau faktor yang berpotensi menjadikan agama sebagai sumber konflik dan kekerasan, di antaranya perbedaan dalam menginterpretasi ajaran-ajaran atau doktrin yang diyakini kebenarannya, keanekaragaman paham, mazhab dan agama dalam masyarakat, umumnya dipahami dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial-keagamaan. Konflik umumnya terjadi karena perbedaan pemahaman dan penafsiran yang bercampur dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk konflik sosial, yaitu perbedaan ajaran dan pandangan, perbedaan suku dan ras umat beragama, perbedaan tingkat kebudayaan, serta masalah mayoritas dan minoritas pemeluk agama.

Sementara itu, dalam instrumentalisasi konflik, sejumlah elit memiliki peran di tengah masyarakat untuk memainkan sentimen agama. Identitas digugat lalu dimanfaatkan untuk membangkitkan sentimen kelompok tertentu. Lewat strategi semacam itu, elit agama dan politik melakukan mobilisasi yang mensyaratkan perpaduan antara identitas kelompok dengan klaim-klaim tertentu terhadap salah satu kelompok minoritas. Mobilisasi massa kemudian menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan dengan modus mengamankan hak kelompok tertentu dan mengurangi kecemasan kelompok lainnya. Jacques Bertrand dengan mengutip Horowitz menjelaskan bahwa kekuasaan memiliki dua pengertian yakni menegaskan status dan menghindari ancaman. Pengertian tersebut biasanya membutuhkan suatu upaya untuk mendominasi lingkungan, menekan perbedaan, serta mencegah dominasi dan tekanan dari pihak lain (Bertrand, 2012).

Ketika kekhawatiran kelompok menjadi dasar bagi mobilisasi politik, perjuangan untuk mendapatkan

kekuasaan menjadi satu-satunya tujuan. Mobilisasi mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi dan klaim-klaim kelompok masyarakat. Ketakutan dan potensi kekerasan yang terbangun sebagai akibat dari sistem politik. Lebih jauh, terdapat beberapa faktor yang bagi R Tockary perlu diuji secara cermat yaitu komunalisme, nasionalisme berdasarkan etnis, penduduk asli, paradigma klaim kebenaran dalam kegiatan misionaris dan dakwah keagamaan (Tockary, 2003). Sementara itu, Franz Magnis Suseno mengatakan, konflik agama di Indonesia disebabkan oleh latar belakang yang kompleks. Salah satu faktor tersebut adalah akumulasi kebencian dalam masyarakat.

Berbagai stigma atas kelompok lain yang selama ini hanya bergulir sebagai *hiddent transcript* menguat pada momentum yang tepat. Kerap kali ketakutan kelompok, ketegangan, atau kekesalan-kekesalan bersifat terselubung, sementara bentuk-bentuk tindakan politik paling umum tetap berada pada wilayah "transkrip tersembunyi" (Bertrand, 2012). Meski di permukaan tampak harmonis namun hal tersebut sebagai bagian yang menutup "transkrip tersembunyi" tersebut dari kegemaran, gerutu, kecurigaan, dan kebencian yang terpendam dalam emosi masing-masing individu. Kebencian individu terus terakumulasi secara sosial sehingga melahirkan kebencian kolektif. Kebencian tersebut menjadi salah satu pemicu tindakan kekerasan masyarakat terhadap kelompok yang mereka anggap menyimpang dengan apa yang mereka pahami. Di samping selama ini, kekerasan etnis belum cukup menekankan kaitan-kaitan antara nasionalisme, lembaga, dan hubungan di antara kelompok-kelompok etnis (Bertrand, 2012). Penjelasan terkait konflik lebih terfokus pada faktor-faktor munculnya konflik komunal, peran kalangan elit politik, dan legitimasi

kelompok. Konflik yang terjadi dalam konteks Ahmadiyah adalah perbedaan dalam interpretasi dan menjadi isu yang dapat mengganggu hubungan mereka dengan masyarakat sekitar. Kenyataannya memang bahwa ajaran agama sewaktu-waktu dapat menjadi penyulut terhadap terjadinya suatu konflik.

Terkait hal tersebut, kerangka instrumental menjelaskan mengapa perbedaan pemahaman keagamaan berpotensi menjadi saluran perjuangan elit politik dan agama dalam konflik antar kelompok tertentu. Para pemimpin dan elit politik menggunakan daya tarik emosional untuk menggerakkan dukungan massa dalam perebutan kekuasaan, sumber-sumber daya dan kepentingan pribadi. Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional. Karena itu kebanyakan ahli menolak argumen bahwa konflik muncul dari semangat identitas kelompok semata. Lewat pendekatan semacam ini, peneliti dapat memusatkan perhatian pada peran elit dalam memobilisasi massa (Bertrand, 2012).

PEMBAHASAN

Peta Sosial-Politik Desa Gegerung

Gegerung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat. Desa ini merupakan satu dari 10 desa yang berada di Kecamatan Lingsar dan memiliki jumlah penduduk yang sebagian besar bersuku Sasak-Muslim. Mayoritas bekerja sebagai petani, buruh bangunan, dan penambang pasir. Desa Gegerung diketahui memperoleh Surat Keputusan (SK) Pemekaran dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat-NTB pada 1998. Akhirnya Desa Gegerung secara administratif menjadi desa baru yang terpisah dari Desa Griya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pada saat itu, Maskum ditunjuk langsung oleh

Bupati Lombok Barat sebagai Kepala Desa Gegerung dengan pertimbangan ia sudah mengabdikan diri sebagai Kepala Dusun sebelum Gegerung berstatus definitif sebagai desa baru di Lombok Barat (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019). Desa Gegerung terdiri dari tujuh dusun yaitu Dusun Jalateng Barat, Dusun Ketapang, Dusun Orong Selatan, Dusun Orong Utara, Dusun Orong Puncak, Dusun Jelateng Timur, dan Dusun Jelateng Tengah. Pemukiman jemaat Ahmadiyah terletak di Dusun Ketapang. Di sebelah utara berbatasan dengan sawah dan pemakaman, sebelah timur berbatasan dengan areal tambang galian pasir, sebelah selatan dibatasi sungai, dan di barat dibatasi bentang persawahan.

Setelah periode kepemimpinan Maskum selaku kepala desa berakhir, dimulailah pemilihan kepala desa secara demokratis. Pemilihan kepala desa pada tahun 2001 berjalan lancar tanpa kendala apapun. Tidak ada gejolak yang terlalu berarti di tengah masyarakat. Mengingat waktu itu jemaat Ahmadiyah belum tinggal di desa tersebut. Pemilihan kepala desa pada 2001 dimenangkan oleh Maskum yang terpilih sebagai Kepala Desa Gegerung periode 2001-2006.

Pada 2005, menjelang berakhirnya periode kepemimpinan Maskum, pemilihan kepala desa yang hendak dilaksanakan pada 2006 sudah mulai memanas. Pada waktu itu kontestan kepala desa mulai diseleksi. Muncul sebanyak tiga kontestan yang berlaga pada pemilihan yang akan dilaksanakan pada awal 2006. Kandidat calon kepala desa yang diloloskan salah satunya adalah petahana, H. Maskum. Dua calon lainnya adalah Sahudin dan Murad. Saat itu, petahana secara hukum masih diperbolehkan mencalonkan diri sebagai kepala desa periode kedua. Setelah mengetahui Maskum kembali maju sebagai calon kepala desa, salah

seorang pemuka agama kembali mencalonkan Sahudin, calon kepala desa yang dia usung pada lima tahun lalu. Ia juga turut terlibat secara langsung mengkampanyekan Sahudin pada 2001. Meski saat itu Sahudin kalah telak dari petahana (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019).

Sementara itu, dua tahun sebelum konflik meletus pada 2005, Jemaat Ahmadiyah sudah menempati rumah baru di Gegerung setelah mengalami pengusiran dari kampung halamannya di sejumlah kabupaten. Jemaat Ahmadiyah berhasil membeli perumahan yang berada di sekitar Dusun Ketapang, Desa Gegerung. Jemaat Ahmadiyah akhirnya tinggal di perumahan yang terpisah dengan warga Gegerung. Perumahan tersebut dibeli oleh Jemaat Ahmadiyah yang sebelumnya merupakan perumahan yang sudah lama mangkrak karena tidak laku. Akhirnya pengusaha perumahan tersebut melelang unit rumah di wilayah Desa Gegerung tersebut.

Mendengar kabar adanya pendatang baru di Desa Gegerung, Kepala Desa Gegerung menerimanya secara terbuka. Awalnya warga Gegerung tidak memperlakukan kedatangan Jemaat Ahmadiyah. Hal ini dapat dilihat dari aktifnya warga Ahmadiyah dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti gotong royong di masjid dan lingkungan sekitar. Jemaat Ahmadiyah pun merasa nyaman tinggal di pemukiman barunya di Desa Gegerung (Wawancara dengan Jauzi, 16 Februari 2018). Namun ternyata kehangatan tersebut tak bertahan lama. Dua tahun Jemaat Ahmadiyah tinggal di desa tersebut ternyata tak sepenuhnya kondusif, mulai terdengar suara-suara lain dari warga Gegerung yang menyebut Ahmadiyah sesat (Wawancara dengan Maskum, Sabtu 13 Juni 2019). Sebagai salah satu kandidat calon kepala desa, Sahudin kerap memantau aktivitas warga Ahmadiyah yang kebetulan di sebelah

timur pemukiman Jemaat Ahmadiyah terdapat tambang pasir, tempat sebagian warga Gegerung bekerja.

Agitasi Menjelang Pemilihan Kepala Desa

Akhir 2005 hubungan Jemaat Ahmadiyah dan warga Gegerung mulai memanas. Keretakan hubungan Jemaat Ahmadiyah dengan warga sekitar berawal dari pengajian yang diampu oleh salah satu tokoh agama di desa tersebut. Pengajian dilaksanakan secara rutin setiap Rabu dan Jumat sore di masjid Dusun Ketapang. Materi pengajian dominan menyinggung dan menyedihkan Ahmadiyah di desa tersebut. Provokasi lewat pengajian dianggap efektif karena mampu membangkitkan sentimen dan kebencian masyarakat terhadap Jemaat Ahmadiyah (Wawancara dengan Maskum, Sabtu 13 Juni 2019). Materi pengajian semacam itu mulai disampaikan menjelang pemilihan kepala desa Gegerung.

Selain diisi oleh tokoh agama dari desa setempat, Tuan Guru sekaligus pengurus masjid juga mengundang penceramah lain dari Lombok Tengah. Tuan Guru dari Lombok Tengah ini memiliki jamaah yang cukup banyak dari desa Gegerung. Sedangkan, Tuan Guru yang berasal dari desa Gegerung terlibat aktif turun secara langsung dari dusun ke dusun untuk menyampaikan kesesatan ajaran Ahmadiyah. "(Alm) Tuan guru itu berkali-kali mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah itu sesat dan wajib hukumnya diserang. Dia keliling dari dusun ke dusun menyebarkan informasi bahwa Ahmadiyah itu sesat." (Wawancara dengan Maskum, Sabtu 13 Juni 2019).

Provokasi dari pintu ke pintu dilakukan selama beberapa bulan. Hal ini diperkuat oleh laporan salah satu NGO di NTB yang menyebut salah seorang

tokoh agama gencar melakukan agitasi. Sayangnya, persoalan ini tidak didalami dari berbagai aspek, latar belakang, maupun motif Tuan Guru tersebut (Laporan LenSA NTB, 2010). Semakin mendekati pemilihan kepala desa, Tuan Guru yang berasal dari Gegerung itu semakin gencar menyebarkan provokasi. Dari situ, isu terhadap kehadiran Ahmadiyah semakin memanas dan mengakibatkan keharmonisan yang telah terbangun sejak kedatangan jemaat Ahmadiyah pupus seketika. Warga sekitar Gegerung percaya bahwa ajaran Ahmadiyah sesat dan menyesatkan. Salah seorang warga menjelaskan bahwa informasi yang ia terima dari mulut ke mulut menyebut Jemaat Ahmadiyah menempatkan orang di luar Ahmadiyah seperti binatang yang najis. Setiap orang Gegerung yang berkunjung ke rumah Jemaat Ahmadiyah, bekas duduknya mesti disucikan (Wawancara dengan Marzuki, 14 Maret 2020). Kabar bohong semacam ini menyebar dan masyarakat Gegerung meyakini bahwa informasi tersebut benar adanya.

Provokasi terkait menyimpangnya ajaran jemaat Ahmadiyah terus dilakukan terutama lewat pengajian. Kabarnya, Tuan Guru di desa tersebut merasa khawatir jemaahnya dipengaruhi oleh warga Ahmadiyah. Kabar bohong tentang ajaran Jemaat Ahmadiyah di tengah sentimen masyarakat desa yang mudah terbakar, menyebabkan gelombang kebencian dan kekerasan meledak (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019). Hal ini diperparah dengan persoalan politik desa yang relatif tidak stabil menjadi pemicu terhambatnya kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Politik desa yang dilaksanakan secara demokratis-prosedural malah berdampak negatif terhadap kehadiran minoritas dan kebebasan berekspresi. Mengingat kebebasan beragama secara universal dijamin lewat pelbagai prinsip-prinsip dasar namun kebebasan beragama

bukanlah nilai yang otonom dan berdiri sendiri. Kebebasan beragama terkait dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang menyangkut sejumlah pihak, instansi seperti negara, kelompok dan individu serta kepentingan kekuasaan (Lihat Ali dalam Taher (Ed), 2009;314).

Sementara itu, kebebasan beragama secara regulatif, tak sepenuhnya mampu menjamin kebebasan beragama di tingkat terbawah karena terdapat kompleksitas persoalan lokal yang lebih potensial. Di satu sisi intoleransi politik terhadap Jemaat Ahmadiyah terjadi karena adanya pengkategorian berdasarkan standar-standar keagamaan tertentu, serta pendidikan, kontak atau hubungan kelompok masyarakat juga turut mempengaruhi. Hubungan antara tokoh agama dan elit politik desa sebagai unsur kuat yang mempengaruhi intoleransi politik di desa Gegerung. Otoritas tokoh agama yang kuat di tengah masyarakat mempermudah mobilisasi massa dan elit politik desa mengarahkan isu untuk memukul lawan politiknya.

Kolaborasi Elit Agama dan Politik Desa

Mengapa provokasi semacam itu mulai dilakukan menjelang pemilihan kepala desa? Ternyata belakangan diketahui bahwa pemuka agama tersebut berafiliasi dengan salah satu kandidat calon kepala desa. Selain memang tokoh agama tersebut sebelumnya tidak sejalan dan kerap berselisih secara lisan maupun fisik dengan kepala desa petahana. Itu sebabnya pada pemilihan kepala desa Gegerung, pemuka agama mendukung Sahudin sebagai calon kepala desa. Calon petahana, Maskum menyertikan hubungannya dengan salah satu tokoh agama semenjak lama sudah tidak harmonis, bahkan sejak Gegerung masih berstatus sebagai dusun (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019).

Calon Kepala Desa penantang, Sahudin, mengakui salah seorang Tuan Guru dari desa Geherung dekat dengannya. Menurutnya, Tuan Guru aktif mendorong masyarakat untuk menjaga lingkungan. Itu sebabnya Tuan Guru tersebut menyatakan dukungan terhadapnya dan terlibat aktif dalam kampanye secara langsung maupun lewat pengajian-pengajian di masjid. Sahudin sendiri menilai Ahmadiyah tidak diterima oleh masyarakat Geherung karena ajarannya dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam (Wawancara dengan Sahudin, 13 Juni 2019).

Sedangkan Maskum selaku petahana merasa dirinya sebagai korban. Sebab pada saat terjadi penyerangan pada akhir 2005 dan Februari 2006, rumahnya turut dikepung warga, dilempari batu dan nyaris dibakar karena dianggap berpihak kepada Ahmadiyah. Ia berusaha menghalangi massa namun tak berhasil. Maskum sebagai kepala desa Geherung waktu itu bertanggung jawab penuh untuk mengendalikan warga. Bahkan sebelum penyerangan terjadi Maskum sempat berkunjung ke rumah warga Ahmadiyah untuk menginformasikan bahwa sejumlah massa dari desa Geherung dan Griya hendak menyerbu perumahan milik Jemaat Ahmadiyah (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019).

Alhasil, pada pemilihan kepala desa pada 2006, Maskum selaku petahana kalah. Sedangkan Sahudin, sebagai calon yang diusung Tuan Guru berhasil memperoleh suara terbanyak. Sahudin pun menjabat sebagai Kepala Desa Geherung periode 2006-2010. Tak lama setelah itu, Tuan Guru yang mendukungnya ia tunjuk sebagai penghulu desa. Kepala desa baru lalu menyusun jadwal ceramah keliling bagi Tuan Guru ke tiap dusun di Desa Geherung (Wawancara dengan Sahudin, 14 Juni 2019).

Sementara itu, warga Ahmadiyah hingga saat ini tidak mengetahui persoalan di balik kekerasan yang menimpanya. Jemaat Ahmadiyah tak mengetahui secara pasti latar belakang penyerangan, padahal sebelumnya mereka sudah beradaptasi dengan baik. Jemaat Ahmadiyah mengaku enggan mendalami persoalan politik desa. Hal itu disebabkan karena jemaat Ahmadiyah waktu itu sebagai pendatang baru dan merasa tak berhak mengetahui dinamika politik di desa tersebut. Warga Ahmadiyah pun tidak dilibatkan dalam pemilihan kepala desa (Wawancara, dengan Jauzi, 16 Februari 2018). Posisi jemaat Ahmadiyah relatif pasif dalam konteks politik sedangkan di tataran sosial ia terlibat aktif dalam kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini, Cornelis Lay membagi aktor tersebut menjadi empat macam. *Pertama*, ormas dalam komunitas agama yang sama. *Kedua*, kekerasan yang melibatkan negara yang bertindak atas nama agama resmi dan merepresi aliran (yang dianggap) "menyimpang" dalam satu agama. *Ketiga*, kekerasan yang melibatkan komunitas dari agama yang sama. *Keempat*, kekerasan yang melibatkan institusi pemegang otoritas agama atas warga dari komunitas yang sama (Lay, 2009). Pola yang terakhir terjadi dalam kasus Ahmadiyah di Lombok Barat. Perbedaan pemahaman keagamaan dijadikan sebagai saluran perjuangan politik salah satu oknum calon kepala desa. Tak ayal, perbedaan berubah menjadi kekacauan agar stabilitas desa terganggu sembari menyandarkan kelompok yang berbeda tersebut kepada pihak yang ingin dijatuhkan. Kalangan elit desa dan Tuan Guru berperan memprovokasi dan memobilisasi massa.

Tuan Guru sebagai elit berhasil membangkitkan sentimen identitas dengan mengaskan perbedaan sedangkan di sisi lain ia memiliki kepentingan tertentu

terhadap kuasa desa lewat kontestasi pemilihan Kepala Desa Gegerung. Demokrasi desa dimanfaatkan sebagai ajang untuk menunjukkan eksistensi elit di tengah masyarakat desa. Salah seorang Tuan Guru dan kandidat kepala desa memegang wacana dan memberikan tekanan terhadap Jemaat Ahmadiyah agar keluar dari Desa Gegerung sembari mengarahkan kesalahan kepada lawan politiknya.

Tokoh agama secara umum sudah lama dilihat sebagai pemicu konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Salah satunya Tuan Guru Amin Djamaluddin yang gencar melakukan serangan terhadap Ahmadiyah lewat pelbagai media. Salah satunya melalui buku "Ahmadiyah Membajak Alquran" yang didistribusikan oleh MUI NTB ke sejumlah pondok pesantren, terlebih Amin aktif mengkampanyekan gerakan anti Ahmadiyah di Lombok (Nurhikmah, 2013). Tipikalisasi Tuan Guru macam ini dalam konteks praksis kebebasan beragama di Lombok, lebih dominan memainkan peran sebagai penyalur wacana-wacana anti pluralisme yang berpotensi mencoreng cita-cita kebebasan dan citra keragaman antar sesama muslim (Umam, 2009). Tuan Guru akhirnya menjadi aktor yang menjembatani disintegrasi antar sesama Muslim seperti apa yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah di Gegerung.

Lima tahun setelah pengusiran, konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah kembali bergejolak pada tahun 2010. Konflik yang terjadi pada 2010 juga tak lepas dari dinamika politik desa Gegerung yang pada saat itu sejak 2006 memilih kepala desa baru. Lima tahun kepemimpinan Sahudin, sejak 2006 berlangsung dinamis. Menjelang berakhir kepemimpinannya, pada 2010, demonstrasi warga terus terjadi. Buruh tambang pasir di sekitar desa tersebut kerap berkonflik dengan pemerintah desa

karena para sopir truk dan buruh lainnya sering merasa dipalak (Wawancara dengan Sahudin, 14 Juni 2019).

Pada tahun itu juga, kampanye-kampanye pemilihan kepala desa berlangsung. Pada saat yang sama beberapa Jemaat Ahmadiyah juga kembali menggarap lahannya di sebelah selatan rumahnya. Kalau Jemaat merasa capek, mereka kemudian menginap di bekas rumahnya. Hal tersebut diketahui oleh beberapa warga. Jemaat Ahmadiyah yang rumahnya tidak mengalami kerusakan parah pada penyerangan pertama dan kedua berusaha memperbaiki kembali rumahnya. Mereka ternyata sudah mulai bosan tinggal di pengungsian Transito secara berdesak-desakan (Wawancara, dengan Jauzi, 16 Februari 2018).

Kabar kembalinya warga Ahmadiyah berhembus dari mulut ke mulut. Baru beberapa bulan tinggal, rumah mereka kembali diserang pada malam harinya. Penyerangan ketiga bukan hanya dilakukan oleh warga dari luar tapi juga cenderung diamini oleh aparat desa setempat. Hal tersebut diakui oleh Sahudin. Peristiwa tersebut terjadi tidak lama setelah Bupati Lombok Barat, Zaini Aroni, melakukan salat Jum'at dan berdialog dengan warga di masjid desa setempat. Sahudin selaku Kepala Desa Gegerung mengakui bahwa pemerintah desa dan warganya dipaksa menghunus pedang bila warga Ahmadiyah berani kembali ke rumahnya lagi. Sahudin selaku kepala desa waktu itu mengaku tidak berada di rumah (Wawancara dengan Sahudin, 14 Juni 2019).

Menurutnya, penyerangan pada tahun 2010 tak hanya dilakukan oleh warga desa Gegerung, melainkan juga warga dari desa Duman dan Desa Griya, tetangga desa yang menjadi tempat melaksanakan pertemuan dengan Bupati Lombok Barat untuk membicarakan proses negoisasi penjualan lahan milik Ahmadiyah di Gegerung. Bupati berniat membeli lahan

dan rumah milik warga Ahmadiyah. Bahkan Zaini Arony melakukan negosiasi harga lahan milik Ahmadiyah tersebut. Namun warga Ahmadiyah, menurut Sahudin selalu menaik-naikkan harga. Mengingat pasca konflik dan kekerasan berlangsung, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada waktu itu semakin serius merealisasikan rencananya untuk membeli tanah tempat tinggal Ahmadiyah di Ketapang menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Setelah asetnya dibeli, para jemaat Ahmadiyah rencananya akan dipindah ke tempat terpencil di sebuah gili di kawasan Desa Sekotong, Lombok Barat. Gagasan ini disepakati oleh Sahudin selaku kepala desa Gegerung (Wawancara dengan Sahudin, 14 Juni 2019). Persoalan ini sekaligus menjadi semacam strategi pemerintah Lobar untuk mengakhiri kekerasan terhadap Ahmadiyah. Meski demikian begitu wacana ini berhembus di media massa, aktivis kemanusiaan merasa keberatan dan mengkritik kebijakan pemerintah tersebut sebagai kebijakan yang diskriminatif terhadap minoritas.

Tak lama setelah ia bersama Zaini Arony, Sahudin menerima kabar bahwa warga desa Gegerung kembali menyerang beberapa warga Ahmadiyah yang menginap di rumahnya. Pada malam itu, Sahudin mengaku berupaya menyelamatkan warga Ahmadiyah lewat jalur selatan kawasan persawahan dan sungai untuk diangkut kembali ke pengungsian. Polisi melakukan penjagaan di lokasi untuk menghindari korban jiwa. Enam rumah hangus dibakar, 18 rumah rusak berat, dua buah sepeda motor, dan satu sepeda dibakar. Sedangkan Jauzi menjelaskan bahwa ia datang ke Ketapang, setelah anggota jemaat Ahmadiyah diusir di lingkungan Beremi, Pancor, Lombok Timur pada 10 September 2003. Namun Jauzi menilai, pembakaran dan penyerangan pada tahun 2010 kurang mendapat pengamanan dari petugas kepolisian. Padahal masa

yang datang ke lokasi berasal dari tiga desa, namun pihak kepolisian hanya menurunkan beberapa anggotanya saja.

Strategi Menumbangkan Lawan Politik

Bagaimana bisa mobilisasi massa begitu efektif dalam kasus ini. Pada titik inilah instrumentalisasi konflik yang digerakkan oleh aktor-aktor politik terjadi. Para pemimpin dan elit politik yang memainkan emosi masyarakat sekaligus mampu mendulang dukungan massa dalam perebutan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Baik dari level terbawah seperti di desa maupun pada level nasional. Strategi yang dilakukan oleh salah satu kandidat calon kepala desa dan tokoh agama di desa Gegerung terbukti ampuh, sehingga berhasil menumbangkan calon petahana. Kedua elit ini bertemu dalam satu kepentingan politik. Meski apa yang dilakukan keduanya menunjukkan suatu budaya politik yang berdampak terhadap konflik dan kekerasan antar sesama warganya.

Masyarakat Gegerung sebagaimana warga desa pada umumnya memiliki ikatan persaudaraan dan emosional yang kuat sehingga ketika perbedaan dari kelompoknya dimunculkan, maka akan dengan sangat mudah berubah menjadi energi konflik. Celah semacam ini kemudian dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraup suara massa. Kolaborasi antara elit politik dan tokoh agama membagi perannya masing-masing. Tokoh agama memainkan kebencian terhadap kelompok yang berbeda sedangkan elit politik desa berupaya melakukan mobilisasi massa dan memainkan isu-isu untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Bergabungnya kepentingan tokoh agama dengan salah satu calon Kepala Desa Gegerung untuk menumbangkan petahana menyebabkan isu keberadaan Ahmadiyah dimanfaatkan. Imbasnya,

sentimen masyarakat tersulut dan kekerasan terjadi. Salah seorang Tuan Guru berhasil menekankan perbedaan antara jemaat Ahmadiyah dengan warga setempat. Sedangkan salah satu kandidat kepala desa melakukan memobilisasi masa sebagai sarana untuk memperoleh kekuasaan yang dicitrakan untuk mengurangi kecemasan masyarakat Desa Gegerung.

Kontestasi antara petahana dan calon penantang yang berkolaborasi dengan salah seorang tokoh agama berhasil memecah suara. Petahana dicitrakan sebagai pendukung Ahmadiyah sedangkan penantang memosisikan diri berada di tengah masa sembari turut memprovokasi massa untuk menyerang jemaat Ahmadiyah. Calon petahana berada dalam posisi problematis karena ia dituntut melindungi warganya yang minoritas dengan konsekuensi ia bakal dimusuhi oleh mayoritas warga yang lain. Lantas calon kepala desa lain mengarahkan isu bahwa calon kepala desa petahana melindungi Jemaat Ahmadiyah yang sudah dianggap sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Itu sebabnya warga desa Gegerung juga melempari rumah calon petahana dan hendak membakarnya.

Sebagai desa baru, Gegerung memiliki elit-elit "baru" yang bergerak secara leluasa. Para aktor politik cenderung memiliki kesempatan yang sangat luas dalam melakukan aktivitas maupun manuver politik (Zuhro (ed), 2009). Hal ini dapat dilihat dari peranan elit-elit politik desa yang lincah memainkan isu-isu perbedaan keyakinan sebagai komoditas untuk meraup simpati masyarakat. Afiliasi antara elit-elit desa sebetulnya sudah menjadi kecenderungan desentralisasi pasca orde baru. Desentralisasi memberi warna lain dalam proses demokratisasi di Indonesia. Keragaman aktor politik ini juga terjadi di arena politik daerah di tingkat provinsi,

kabupaten bahkan desa. Aktor-aktor politik di daerah berhasil memainkan perannya yang pragmatis dan dengan pelbagai siasat manipulatif sehingga dapat membelokkan tujuan desentralisasi dan demokrasi itu sendiri.

Calon kepala desa Gegerung sebagai kelompok elit-politik berperan memainkan identitas serta memanfaatkan sentimen masyarakat terhadap kelompok Ahmadiyah. Lewat kondisi tersebut elit politik melakukan mobilisasi massa yang mensyaratkan perpaduan antara kepentingan politik, identitas kelompok dan klaim-klaim "kesesatan" Ahmadiyah. Konflik dan kekerasan terjadi antar komunitas atau aliran dalam internal agama melibatkan aktor yang variatif. Strategi tersebut ternyata berhasil memperoleh simpati warga Desa Gegerung.

Meski demikian, perwakilan dari Kesbangpoldagri NTB, Katarudin mengaku tidak mengetahui adanya motif politik di balik serangan warga terhadap Jemaat Ahmadiyah. Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan tim penyelaras tak menemukan isu politik di balik penyerangan warga terhadap jemaat Ahmadiyah di Lombok. Ia menganggap persoalan tersebut murni soal isu agama (Wawancara dengan Katarudin, 17 Juni 2018).

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba memandang budaya politik sebagai peran individu terhadap sistem dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dimainkan dalam sistem politik. Budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial dalam sistem politik. Sikap positif atau negatif seseorang terhadap sistem politik tergantung dari corak orientasi budaya politik yang digunakannya (Suprpto, 2013). Perasaan dan kecurigaan menjadi cerminan budaya politik yang tampak dalam pandangan dan sikap seseorang terhadap pengelompokan di sekitarnya.

Dengan kata lain konflik antar kelompok atau golongan sosial merupakan ciri aktual yang dapat mewarnai budaya politik di dalam masyarakat.

Kontestasi politik desa yang seharusnya menegaskan kesetaraan dan menghindari ancaman malah berjalan terbalik dan destruktif. Para kontestan berupaya memunculkan perbedaan untuk memukul pihak lawan. Tekanan tersebut hadir dalam berbagai bentuk baik tampak secara langsung lewat kekerasan fisik maupun melalui kekerasan simbolik yang bergerak secara tertutup. Kondisi semacam itu lantas dimanfaatkan dengan melakukan politisasi terhadap kehadiran Jemaat Ahmadiyah. Mobilisasi politik dan perjuangan untuk mendapatkan kekuasaan sebagai satu-satunya tujuan elit-elit di desa Gegerung. Mobilisasi tersebut juga mendorong dan mengambil bentuk lain sesuai dengan jejaring tokoh tertentu guna mengungkapkan dan membangun kepentingan-kepentingan pribadi dan menyerang kelompok lain untuk menjatuhkan lawan politik.

Dengan demikian, hal ini dapat diartikan bahwa perkembangan budaya politik suatu masyarakat dipengaruhi oleh kompleksitas nilai yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh orientasi antar nilai yang memungkinkan timbulnya kontak-kontak di antara budaya politik suatu kelompok atau golongan disebut sebagai sub-budaya politik, yang pada dasarnya merupakan proses terjadinya pengembangan budaya. Keserasian antara struktur budaya dan struktur politik menunjukkan tingkat keserasian budaya politik masyarakat (Zuhro, (ed), 2009). Di Gegerung, struktur budaya demokratis sebagai desa baru belum terbentuk sehingga kontestasi politik berjalan secara timpang. Aktor-aktor politik "baru" mulai mengemuka melalui pelbagai citra, baik dengan menggunakan simbol-simbol agama maupun

keterlibatan secara langsung dengan kehidupan sosial-budaya masyarakat.

Kekerasan berbasis politik dan doktrin agama tertentu yang digerakkan secara instrumental menyimpan kandungan legitimasi teologis yang tak mudah didialogkan. Fenomena kekerasan jenis ini memiliki jalinan dan keterkaitan entitas dengan pelbagai macam faktor lain seperti politik dan ekonomi. Namun karena pelbagai kasus kekerasan kerap dilihat secara simplistik akhirnya konflik atas nama agama dinilai disebabkan semata oleh persoalan perbedaan keyakinan, regulasi pemerintah dan pengaruh identitas masyarakat. Padahal di balik itu terdapat variabel yang kerap tersembunyi yakni dinamikan politik di desa Gegerung. Di permukaan tampak persoalan keagamaan mengemuka, akan tetapi di baliknya terdapat agenda politik.

Jemaat Ahmadiyah di Gegerung berada dalam lingkaran kekerasan. Lingkaran kekerasan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan elit-elit politik yang memainkan sentimen agama dengan melakukan kampanye lewat simbol agama dan menyebarkan kebencian terhadap kelompok Ahmadiyah. Simbol-simbol keagamaan menjadi semacam representasi sosial yang bertaut erat dengan sifat komunal masyarakat. Lewat simbol agama tersebut komunalitas sosial terjalin kuat (Mursalin dan Hasan, 2011).

Meski pemilihan kepala desa di Gegerung dilaksanakan secara demokratis, namun pada kenyataannya tindakan para kontestan mencederai demokrasi sendiri. Salah satu hal yang merusak demokrasi menurut Robert A. Dahl adalah memaksa pemilih dengan motif dan unsur-unsur kekerasan terhadap pihak lain. Padahal dalam demokrasi, setiap masyarakat bebas mengeskpresikan diri (Abdillah dkk, 2003). Kekerasan-kekerasan terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan melibatkan pelbagai pihak. Tidak

hanya warga setempat, tetapi juga peran tokoh agama dan instrumen-instrumen pemerintahan di tingkat kabupaten. Ternyata pemicu konflik tak sepenuhnya berangkat dari apa yang telah disimpulkan oleh sejumlah peneliti yang berhubungan dengan tafsir keagamaan maupun regulasi yang bersifat makro. Terdapat variabel lain yang juga berkontribusi terhadap konflik dan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.

Regulasi dalam bentuk fatwa MUI dan peraturan bupati Lombok Barat misalnya tidak berhubungan secara langsung dengan konflik dan kekerasan. Hal ini bertentangan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyebut kekerasan bermuara pada fatwa MUI dan negara yang bersifat tendensius dan mendorong terjadinya kekerasan (Gafar, 2013). Dalam kasus kekerasan di desa Gegerung, tokoh agama, kandidat kepala desa dan warga setempat tak mengetahui adanya SK dari pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat yang melarang kehadiran Ahmadiyah. Warga desa Gegerung juga tidak mengetahui fatwa MUI tahun 1980 dan belakangan muncul Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada 2008 yang melarang dakwah Ahmadiyah. Aturan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut berdasarkan SK Bupati Lombok Barat Nomor 35/2001.

Kendati demikian, surat keputusan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ditentang oleh Komnas HAM, Zumrotin yang menyatakan bahwa SK tersebut menunjukkan adanya kekacauan regulasi. SK ini dinilai bertentangan dengan konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Aturan tersebut dikeluarkan setelah pemda melakukan koordinasi dengan MUI dan Kementerian Agama Lombok Barat. Selain itu terdapat fatwa kesesatan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh MUI. Lemahnya pemahaman terkait regulasi menyebabkan para tokoh agama

dan masyarakat luas tak menghiraukan SK Pemda Lombok Barat maupun fatwa MUI (Wahab dan Fakhruddin, 2013).

Regulasi-regulasi tersebut hanya diketahui di level elit, sedangkan di bawah variabel budaya politik lebih berkontribusi besar terhadap lahirnya konflik dan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah di Gegerung. Budaya politik berkaitan erat dengan pandangan dan sikap individu dalam masyarakat sebagai sesama warga negara. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan rasa percaya diri serta permusuhan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain.

Selama terjadi kekerasan, Jemaat Ahmadiyah di Gegerung tidak melakukan perlawanan. Mereka memilih lari keluar dari desa. Saat situasi mencekam dan ketika semua rumah mereka dirusak dan dibakar, Jemaat Ahmadiyah terpaksa melarikan diri melalui sawah sebelah selatan Desa Gegerung dan menyeberangi sungai dekat Desa Griya (Wawancara dengan Jauzi, 16 Februari 2018). Dalam beberapa kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, tidak pernah terjadi benturan fisik secara langsung karena Jemaat Ahmadiyah memilih berlaku pasif. Mereka memilih bertahan tanpa perlawanan atas kekerasan warga yang terjadi (Gaffar, 2013).

Karena itu, setelah peristiwa kekerasan tersebut berlangsung pada tahun 2005, 2006, dan 2010, mediasi dilakukan dengan menghadirkan perwakilan POLDA NTB, pemerintah Kabupaten Lombok Barat, tokoh agama, dan masyarakat kedua belah pihak. Mediasi berjalan alot meski tidak menemui titik temu antar sejumlah pihak, baik dari warga Gegerung dan Griya, tokoh agama, pemerintah maupun Jemaat Ahmadiyah sendiri (Wawancara dengan Maskum, 12 Juni 2019). Pemerintah cenderung menganggap

bahwa konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah di Gegerung semata dipicu oleh persoalan perbedaan keyakinan sehingga menyebabkan strategi mediasi tidak berjalan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB terkait masalah Ahmadiyah tidak jauh beda dengan sikap pemerintah pusat di bawah Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY). Seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah NTB tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan, melindungi, atau mengembalikan jemaat Ahmadiyah ke kampunghalamannya. Pemerintah daerah justru sudah merasa 'menyelesaikan' masalah Jemaat Ahmadiyah dengan bersedia menampung mereka di Transto, Majeluk, Mataram.

Katarudin selaku sekretaris Kesbangpoldagri NTB, menyebut pemerintah NTB sangat memperhatikan Ahmadiyah. Terkait itu, merujuk dari surat resmi Gubernur NTB tanggal 21 Mei 2011 mengeluarkan surat No.357, Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Pembina warga jemaat Ahmadiyah, Provinsi NTB. Gubernur menunjuk 22 pejabat lintas instansi yang pada saat itu diketuai oleh Kepala Bakesbangpoldagri NTB, Wakil Ketua Kakanwil Kementerian Agama, dan sekretaris Kabid Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan Bakesbangpoldagri NTB (Wawancara dengan Katarudin, 17 Juni 2018).

Karena mediasi telah dilakukan berkali-kali, Katarudin tak mengingat berapa kali pemerintah mengadakan mediasi dengan warga Gegerung dan Jemaat Ahmadiyah. Akhirnya pihak pemerintah memutuskan agar warga Ahmadiyah harus dipisah dari warga sekitar. Pemerintah akhirnya berinisiatif membuat jadwal dakwah bersama MUI untuk terlibat aktif berdakwah di Transito dengan tujuan agar Ahmadiyah keluar dari ajaran mereka. Selain itu menurutnya,

pengungsi di Transito telah diperlakukan sangat baik oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Ia mengaku Pemprov NTB memberi pesangon dalam bentuk beras dan makanan lainnya setiap bulan. Pemerintah provinsi NTB juga memberi pelatihan pemberdayaan ekonomi dan usaha kecil, seperti memfasilitasi warga memperoleh keterampilan menjahit (Wawancara dengan Katarudin, 17 Juni 2018).

Sedangkan laporan dari Lembaga Studi Kemanusiaan (LENSA) NTB, menyebut bahwa mayoritas anggota tim yang terlibat di dalam mediasi tersebut menganggap aliran Ahmadiyah sesat. Oleh karena itulah, tim ini tidak berhasil memberikan kebijakan terbaik bagi warga Ahmadiyah. Kesepakatan tim malah membentuk juru dakwah yang berasal dari para tuan guru untuk "meluruskan" ajaran Ahmadiyah yang mereka anggap menyimpang. Dalam beberapa pertemuan yang dilakukan, tim penyelaras kerap melaksanakan dialog bersama Jemaat Ahmadiyah. Tim tersebut tidak berhasil mencari jalan keluar terbaik bagi warga Ahmadiyah (Laporan LenSa NTB, 2010). Padahal di balik konflik dan kekerasan tersebut terdapat ambisi politik elit desa yang dimanipulasi untuk memukul lawan politiknya.

SIMPULAN

Pola konflik dan kekerasan terhadap Ahmadiyah memang kompleks. Di balik kompleksitas tersebut, terdapat pemicu utama yang berhubungan keterlibatan para aktor politik dalam proses mobilisasi massa. Politik desa yang berada dalam unit terbawah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Konflik Ahmadiyah di Gegerung menjadi aktual, salah satunya, karena adanya instrumentasi yang dimainkan oleh aktor politik dalam suksesi pemilihan umum baik di tingkat desa, kabupaten, provinsi maupun dalam

skala nasional. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang menjelaskan keterkaitan antara akumulasi kebencian kelompok masyarakat dengan dorongan untuk bertindak vandal terhadap kelompok lain.

Aktor-aktor politik selain punya modal finansial juga menguasai wacana publik. Para Jemaat Ahmadiyah yang notabene sebagai pendatang baru di tempat tersebut tidak mengetahui agenda apa di balik penyerangan warga Gegerung. Padahal sebelumnya interaksi dan komunikasi antara Ahmadiyah dan warga sekitar berlangsung hangat. Salah satu kontestan calon kepala desa memiliki kepentingan untuk menumbangkan petahana dan kepentingan tersebut setali dengan keinginan tokoh agama. Perbedaannya, calon kepala desa bertujuan menjadi orang nomor satu di desa sedangkan tokoh agama memiliki motif personal dengan petahana. Salah satu strategi yang digunakan sehingga persoalan tersebut terjadi adalah dengan memanfaatkan keberadaan tokoh agama di desa tersebut. Bertemunya kepentingan untuk menumbangkan petahana yang memiliki kekuatan politik menyebabkan arus mobilisasi massa menyandarkan seluruh persoalan kepada petahana. Hal tersebut membuktikan bahwa kehadiran kelompok Ahmadiyah di Desa Gegerung dimanfaatkan oleh elit politik desa untuk meraup suaranya.

Dengan demikian, hasil penelitian yang melihat pemicu kekerasan dengan mengaitkan antara konflik terhadap

Ahmadiyah dan regulasi di tingkat elit tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh keputusan SKB Tiga Menteri, fatwa MUI dan SK Bupati Lombok Barat. Aturan yang dinilai menyudutkan kelompok Ahmadiyah tersebut tak sepenuhnya diketahui oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Gegerung. Politik pada level makro tidak secara langsung menyentuh watak dan perilaku masyarakat. Sedangkan di level mikro, aktor-aktor desa bergerak secara langsung memobilisasi masyarakat untuk mengusir Jemaat Ahmadiyah. Sebelum pemerintah berinisiatif menyelesaikan konflik, mestinya terlebih dahulu menggali akar konflik secara komprehensif agar penyelesaian tepat sasaran dan dapat memosisikan pihak-pihak yang terlibat secara tepat baik lewat mediasi, resolusi maupun dengan melakukan transformasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterima kasih kepada beberapa pihak dan informan baik dari elit-elit desa maupun masyarakat Gegerung yang ramah. Juga penulis berterima kasih kepada para Jemaat Ahmadiyah di asrama Transito Mataram yang terbuka dan bergairah menerima kedatangan penulis begitu halnya saat diwawancarai. Mereka adalah orang-orang yang terlibat dalam penggalian data sekaligus sebagai informasi dalam tulisan ini. Terakhir, penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan koreksi dan catatan untuk perbaikan tulisan ini.

DAFTAR ACUAN

- Abdillah, Masykuri. (2003). *Konflik Komunal di Indonesia*. Jakarta: Inis.
- Arqi, M Amin, Tutu Chusniyah, Aji Bagus Priyambodo. (2018). *Persepsi Ancaman Sebagai Prediktor Intoleransi Politik Terhadap Jemaat Ahmadiyah Pada Jamaah NW Pancor Lombok Timur*. (Paper: Tidak diterbitkan). Universitas Negeri Malang: Prosiding Seminar Nasional Psikologi Indigenius Indonesia 27 Agustus.
- Bertrand, Jacques. (2012). *Nasionalisme dan konflik Etnis di Indonesia*. (Achmad Munjid, Penerjemah). Yogyakarta: Ombak.
- Gaffar, Abdul. (2013). Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dalam Perspektif Kekerasan Negara: Dua Kasus dari Surabaya Jawa Timur dan Lombok NTB. *Jurnal Sosiologi Islam* Vol. 3, No. 2.
- Lay, Cornelis. (2009). Kekerasan Atas Nama Agama: Perspektif Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* vol. 13. No. 1.
- Nurhikmah. (2013). *Satu Dekade Jadi Rumpun Terasing: Narasi Identitas dalam Kekerasan JAI di Lombok*. Yogyakarta: Tesis Universitas Sanata Dharma.
- Mursalin, Ayub dan Bakhtiar Hasan. (2011). Konflik Komunal Mengatasnamakan Agama di Indonesia: Analisis Terhadap Konflik Ahmadiyah dalam Pemberitaan Media 2005-2011. *Jurnal Kontekstualita* Vol. 26, No.1.
- Suprpto. (2013). *Semberbak Dupa di Pulau Seribu Satu Masjid*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Taher, Elza Peldi (Ed). (2009). *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Tockary, R. (2003). *Catatan Singkat Tentang Etnis Agama di Indonesia dimuat dalam Konflik Komunal di Indonesia Saat Ini*. Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah.
- Umam, Fawaizul. (2009). Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok. *Jurnal Ulumuna* vol. XIII, no. 2.
- Wahab, Abdul Jamil dan Fakhruddin. (2019). Menakar Efektivitas SKB tentang Ahmadiyah dan Faktor Penyebabnya: Studi Kasus Konflik Ahmadiyah di Desa Gereneng Lombok Timur. *Jurnal Harmoni* vol. 17, Nomor 2.
- Zuhro, R. Siti. (2009). *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali*. Yogyakarta: Ombak.
- _____. (2009). *Demokrasi Lokal: Peran Aktor dalam Demokratisasi*. Yogyakarta: Ombak.
- Zulkarnaen, Iskandar. (2002). *Gerakan Ahmadiyah*. Yogyakarta: LKiS.
- Laporan Advokasi Lembaga Studi Kemanusiaan. (2010). (Dokumen: Tidak Diterbitkan). NTB: LENSAs.

Wawancara

Jauzi. (2018 Februari 16). Personal Interview

Katarudin, (2018 Juni 17). Personal Interview

Maskum. (2019 Juni 12). Personal Interview

Marzuki. (2020 Maret 14). Personal Interview

Sahudin. (2019 Juni 14). Personal Interview

Saleh, Ahmad. (2020 Maret 14). Personal Interview